

STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA JUHAR BARU, KECAMATAN GALANG, KABUPATEN DELI SERDANG

Sarah Lestari Tampubolon¹, Friska Lorentina Purba², Putri Amelia Simbolon³, Unedo Sean Hillinois Sinaga⁴, Drs. Halking, M.Si⁵
PPKN FIS Universitas Negeri Medan

[1sarahtampubolon14@gmail.com](mailto:sarahtampubolon14@gmail.com), [2friskapurba169@gmail.com](mailto:friskapurba169@gmail.com), [3putrylia4298@gmail.com](mailto:putrylia4298@gmail.com),
[4unedo17sinaga@gmail.com](mailto:unedo17sinaga@gmail.com), [5halking123@unimed.ac.id](mailto:halking123@unimed.ac.id)

ABSTRACT

In the discussion of Mini Research Group 3, a phenomenon regarding long-term village fund management was raised, regarding transparency and accountability by village government leadership and community oversight, specifically in Juhar Baru Village, Galang District, Deli Serdang Regency. In this case, of course, there is a question that we will raise and we will include in the Mini Research report regarding budget efficiency or fund management for Juhar Baru Village. Is the allocation of funds used by the Juhar Baru Village government on target or not? For example, Direct Cash Assistance (BLT), electricity, water, educational facilities or hospitals and so on. One of our group members, Friska Lorentina Purba, acted as a facilitator to make it easier to ask several questions regarding the problem of village fund management in Juhar Baru Village. This research employs qualitative research methods, involving direct fieldwork to observe current problems or phenomena, and relying on several sources from journals, articles, and books to further strengthen the author's arguments. The results of this study indicate that the management of village funds, allocation of funds, and village budget expenditures are highly transparent and accountable, in line with the strategy implemented by the Juhar Baru village head. This is because the village head and village officials have a strong collaboration in developing village infrastructure, as evidenced by the infrastructure development process outlined in the research findings. However, despite the need for improvements in education, which is still lacking, progress in Juhar Baru Village is already evident when weighed against other needs.

Keywords: *Village Head Strategy, Transparency and Accountability, Village Fund Management*

ABSTRAK

Dalam pembahasan Mini Riset kelompok 3 yaitu mengangkat sebuah fenomena mengenai pengelolaan dana desa tepatnya menyangkut tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas oleh kepemimpinan pemerintahan desa serta pengawasan masyarakat tepatnya di Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini, tentu ada sebuah pertanyaan yang akan kami ajukan dan akan kami tuang kedalam laporan Mini Riset berkenaan dengan efisiensi anggaran atau pengelolaan dana untuk Desa Juhar Baru. Apakah alokasi dana yang digunakan oleh pemerintahan Desa Juhar Baru sudah tepat sasaran atau tidak? Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), listrik, air, fasilitas pendidikan ataupun rumah sakit dan lain

sebagainya. Salah satu teman kelompok kami yaitu Friska Lorentina Purba sebagai fasilitator untuk lebih mudah dalam mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut soal pengelolaan dana desa di Desa Juhar Baru. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu secara langsung terjun ke lapangan untuk melihat permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi serta mengandalkan beberapa sumber jurnal, artikel, buku untuk semakin memperkuat argument penulis. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu pengelolaan dana desa, alokasi dana desa serta anggaran belanja desa sangat transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan strategi yang dilakukan oleh kepala desa Juhar Baru. Pasalnya kepala desa beserta perangkat desa memiliki kerjasama yang tinggi dalam membangun infrastruktur desa dibuktikan dengan adanya proses pembangunan infrastuktur yang telah dipaparkan pada hasil penelitian. Namun, disamping itu perlunya perbaikan dalam bidang pendidikan yang masih kurang akan tetap jika dipertimbangkan dengan kebutuhan lainnya kemajuan pada Desa Juhar Baru sudah nampak.

Kata Kunci : Strategi Kepala Desa, Transparansi dan Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

A. Pendahuluan

Desa adalah struktur pemerintahan terkecil di negara ini, terkhusus di Desa Juhar Baru. Kelompok 3 meneliti apakah ada nya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas sangat penting dalam mengelola desa, seperti kita lihat bahwasannya banyak sekali masyarakat tidak merasakan dana desa, banyak masyarakat yang seharusnya bisa merasakan dana desa, bantuan dari pemerintah, akan tetapi tidak terealisasi dengan baik.

Masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan serta merasakan dana desa, karena mereka juga membayar pajak di negara ini. Memiliki sifat akuntabilitas dalam mengelola dana

desa adalah salah satu yang penting, karena banyak sekarang oknum oknum pemerintahan desa yang tidak jujur dan bertanggung jawab di dalam pengelolaan desa, akan tetapi mereka tetap tidak melaksanakannya dengan baik dan jujur. Seharusnya banyak pelayanan pelayanan umum seperti puskes dan lain sebagainya di desa untuk membantu masyarakat, akan tetapi pelayanan pelayanan tersebut tidak ada, mungkin ada akan tetapi dana nya kurang dan tidak memadai, menjadi pertanyaannya bagaimana prinsip pengelolaan dana desa ini menurut pemerintah, karena masyarakat pun berhak untuk mendapatkan pelayanan publik.

Dalam pembahasan Mini Riset kelompok 3 yaitu mengangkat sebuah fenomena mengenai pengelolaan dana desa tepatnya menyangkut tentang bagaimana transparansi dan akuntabilitas oleh kepemimpinan pemerintahan desa serta pengawasan masyarakat tepatnya di Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini, tentu ada sebuah pertanyaan yang akan kami ajukan dan akan kami tuang kedalam laporan Mini Riset berkenaan dengan efisiensi anggaran atau pengelolaan dana untuk Desa Juhar Baru. Apakah alokasi dana yang digunakan oleh pemerintahan Desa Juhar Baru sudah tepat sasaran atau tidak? Contohnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), listrik, air, fasilitas pendidikan ataupun rumah sakit dan lain sebagainya. Salah satu teman kelompok kami yaitu Friska Lorentina Purba sebagai fasilitator untuk lebih mudah dalam mengajukan beberapa pertanyaan menyangkut soal

pengelolaan dana desa di Desa Juhar Baru.

Selain itu, kami juga mendapatkan info bahwasannya dalam waktu pembangunan parit sawah sudah terealisasi dan berjalan dengan baik. Parit tersebut menjadi program penting untuk masyarakat Desa Juhar Baru, pasalnya Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Juhar Baru adalah petani sehingga pembuatan parit sawah tersebut dibangun untuk memudahkan air mengalir ke permukaan tanah padi, sehingga masyarakat tidak kesulitan mengalirkan air ke sawah. Kemudian, dari pengakuan yang kami terima dari teman kami Friska, apakah ada program-program lain dari pemerintah yang sudah direncanakan dan mungkin sudah dilaksanakan saat ini. Menurut pernyataan Presiden ke-7 Jokowi Dodo di Platform media sosial yang mengatakan sudah banyaknya kasus korupsi terjadi sekitar kurang lebih 900 Kepala Desa (KADES) di

Indonesia. Sesuai judul kami dengan hal ini, kami akan mencari data bagaimana bentuk kepemimpinan Kepala Desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tepatnya di Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban atau solusi atas suatu masalah atau pertanyaan penelitian melalui pengumpulan dan analisis data yang sistematis dan objektif. Beberapa tujuan penelitian kami adalah untuk: Menganalisis dan mengevaluasi bagaimana strategi kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang transparansi dan akuntabilitas. Apakah sudah terealisasi dengan baik atau tidak tepatnya di Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang dan Mengidentifikasi apa yang menjadi program-

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

program berkelanjutan yang dilakukan dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat dalam kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa di Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang kelompok 3 gunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena secara lebih mendalam berdasarkan data yang sebelumnya telah dikumpulkan berupa kata-kata atau bentuk kalimat bukan dengan angka, akan tetapi dengan cara mengamati kejadian yang sebenarnya terjadi di lapangan. Penelitian ini akan menggali pemahaman melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, analisis dokumen dan dokumentasi dalam mengamati situasi yang sangat kompleks.

Bentuk kepemimpinan yang dipraktikkan oleh Kepala Desa Juhar

Baru merupakan kunci keberhasilan strategi transparansi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kepemimpinan di sini cenderung mengadopsi pola Partisipatif-Progresif, atau sering juga disebut Kepemimpinan Transformasional, yang sangat efektif dalam menumbuhkan budaya akuntabilitas dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Kepala Desa memandang posisinya bukan sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai fasilitator dan motor penggerak perubahan di desa.

Pola kepemimpinan ini memiliki beberapa ciri menonjol yang secara langsung mendukung tata kelola Dana Desa yang baik. Pertama, Keterbukaan dan Inklusivitas menjadi Filosofi Dasar. Kepala Desa Juhar Baru menerapkan prinsip bahwa kekuasaan harus didelegasikan dan tanggung jawab harus dibagi. Ini berarti bahwa keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan alokasi dan penggunaan Dana Desa, tidak diambil secara sepihak atau otoriter. Sebaliknya, Kepala Desa selalu memastikan keterlibatan aktif dari perangkat desa, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan kelompok kepentingan lainnya dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Keterlibatan ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif atas program-program desa.

Mengenai wawancara yang telah peneliti lakukan dengan sekretaris desa Bapak Ferdinan Damanik dan menyangkut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti yaitu sudut pandang Bapak Ferdinan Damanik mengenai banyak kasus yang beredar dimedia sosial tentang Bantuan Langsung Tunai atau yang sering kita sebut dengan kata "BLT" tidak tepat sasaran pada masyarakat desa yang membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, sangat banyak sekali kita temukan kasus-kasus seperti ini khususnya pada daerah pedalaman seperti desa.

Peneliti menanyakan bagaimana pandangan atau perspektif Bapak Ferdinan Damanik mengenai pernyataan tersebut. Bapak Ferdinan Damanik menganggap bahwa permasalahan atau kasus ini

sebenarnya disebut dengan penyelewengan, yang artinya seorang petinggi atau pemerintah yang dipercayai untuk memberikan pelayanannya yang baik kepada masyarakat namun hal itu sangat berbanding terbalik, dianggap tidak mampu bertanggungjawab dalam mengemban tugasnya atau pengabdianya kepada masyarakat. Bapak Ferdinan Damanik mengatakan “ Dengan pernyataan yang sudah kalian katakan, bahwa permasalahan atau kasus tersebut, jika didalam dunia pemerintahan itu juga disebut dengan fiktif, karena tidak dimulai dengan awal yang baik, sebelum keuangan desa dikelola di desa Juhar Baru ini terdapat 4 tahap atau prosedur yang harus dilengkapi dan dilakukan sebelum perangkat desa terjun langsung ke masyarakat “.

Adapun 4 tahap atau prosedur yang harus ditaati dan dilakukan ialah, yang pertama “Musyawarah Dusun”, setiap dusun atau setiap orang yang dipercayai untuk memimpin beberapa dusun di Desa Juhar Baru tersebut memiliki hak dan wewenang dalam mengajukan beberapa kebutuhan

masyarakat itu sendiri. Dalam artian, setiap masyarakat Desa Juhar Baru akan menyampaikan keluhan ataupun pendapatnya dan disampaikan kepada pemimpin dusun masing-masing, setelah itu masing-masing pemimpin dusun akan menyampaikannya langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu kepala desa dan rekan-rekannya.

Lalu, pada tahap yang kedua yaitu “Tampung Musyawarah Pembangunan Desa” atau yang disebut dengan (Musrembangdes), yang dimana maksud dan tujuan dari Musrembangdes tersebut ialah untuk menampung segala aspirasi, keluhan, pendapat, pandangan masyarakat Desa Juhar Baru untuk diberlakukan sebagai bentuk perangkat desa menghargai segala aspirasi masyarakat desa. Terutama dalam hal pembangunan desa, tentu masyarakat memiliki hak tertinggi dalam menyampaikan pendapat mengenai pembangunan di desa tersebut, apakah fasilitas yang disediakan pemerintah desa sudah mencukupi atau belum, itu semua bergantung

pada masyarakat Desa Juhar Baru itu sendiri.

Kemudian, pada tahap ketiga yaitu membuat “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa” atau yang disebut dengan (RPJMDes) artinya satu periode kepala desa lahir setelah kepala desa tiga bulan dilantik. Dalam hal ini, masih sama dengan maksud dan tujuan pada Musrembangdes tadi yang telah disebutkan. Menampung segala aspirasi masyarakat dengan tujuan dalam membentuk pembangunan desa dan yang nantinya akan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes).

Program atau kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) tersebut meliputi, pembuatan gorong-gorong yang berada di samping jalan atau potongan area di bawahnya, serta satu-satunya tujuan gorong-gorong adalah untuk membantu aliran air, yang dimana kita ketahui bahwa hampir 90 % mata pencaharian masyarakat Desa Juhar Baru adalah petani dan masing-masing masyarakatnya memiliki lahan guna mempertahankan hidup mereka.

Selanjutnya ialah penyediaan jembatan kecil (skala lokal desa), Desa Juhar Baru juga terhubung dengan beberapa desa lainnya seperti Desa Kotasari, Desa Jaharun, Desa Kotangan, Desa Pisang Pala dan banyak desa lainnya. Melihat banyaknya desa yang saling terhubung memungkinkan pemerintah desa untuk membangun jembatan yang layak untuk dilalui oleh seluruh masyarakat dengan mudah. Akan tetapi, terdapat beberapa desa yang terhubung melalui jalan yang tersedia.

Setelah melihat tampungan dari masyarakat yang diterima oleh pemerintah desa melalui pembangunan infrastrukturnya, pemerintah desa juga berinisiatif dengan konsep masyarakatnya juga perlu dibangun contohnya pembangunan posyandu. Pemerintah Desa Juhar Baru mengharapkan bahwa pembangunan posyandu ini harus terus berlanjut dan bertahan. Bapak Ferdinan Damanik mengatakan “ Posyandu di desa ini menurut saya sudah berjalan dengan baik, rutin dilakukan untuk imunisasi anak-anak yang membutuhkan,

penyediaan seperti bubur kacang hijau, susu, telur, dan buah. Jadi mudah-mudahan pembangunan posyandu ini dapat berjalan baik sampai kedepannya “.

Pada tahap terakhir yaitu tahap keempat, Peraturan Desa (Perdes), terkait dengan peraturan desa tersebut terbentuklah sebuah kebijakan baru dan membentuk anggota atau tim yang menyelenggarakan serta mengsucceskan berjalannya program tersebut yaitu Apebedes bertujuan untuk mengundang kembali masyarakat untuk merencanakan dan mendiskusikan yang menjadi program atau rencana dari segala hasil tampungan masyarakat dan masukan dari pemerintah desa. Bapak Ferdinan Damanik mengatakan “ Ketika program dan kebijakan yang disusun secara terstruktur, saya rasa tidak ada yang menjadi kendala untuk permasalahan selanjutnya, tidak bisa dipungkiri akan tetap ada batu-batu kecil, akan tetapi dengan dikeluarkannya kebijakan atau program yang telah saya sebutkan tadi untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi “.

Selanjutnya menyangkut pada pernyataan tentang kebijakan dan program yang ada, bahwasannya di Desa Juhar Baru memiliki program dalam melakukan pembersihan sungai sekali dalam dua tahun, yang menjadi pertanyaan peneliti kepada Bapak Ferdinan Damanik, apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak, melihat kotornya air sungai dan terdapat kotoran seperti rumput liar, pelepah sawit dan lain sebagainya.

Bapak Ferdinan Damanik mengatakan “ Pembersihan sungai bukanlah sepenuhnya tanggungjawab kami, tetap ada prosedur yang harus kami ikuti untuk permasalahan pembersihan sungai, kalau pembersihan sungai memang wajibnya dilakukan dalam dua tahun sekali. Saat pembentukan RPJMDes tadi yang telah saya sebutkan, kami memiliki wewenang untuk membuat surat pengajuan kepada tingkat atau dinas Kabupaten Deli Serdang untuk program pembersihan sungai. Karena pembersihan sungai bukan bagian dari tugas atau tanggungjawab kepala desa, akan tetapi kami memiliki kesempatan untuk menyampaikan

surat permohonan untuk pembersihan sungai di Desa Juhar Baru. Kemudian, pada pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menurut Bapak Ferdinan Damanik mengenai kondisi atau ketersediaan fasilitas yang ada di Desa Juhar Baru dan apakah perangkat desa sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Ada beberapa fasilitas yang masih belum terealisasi dengan baik dan mendapatkan informasi langsung oleh Bapak Ferdinan Damanik.

Gambar 1 Jalan Desa Juhar Baru



Gambar 2 Perbaikan Jalan



Gambar 3 Kondisi Sungai



**Gambar 4 Pembangunan Parit
Sawah**



Berdasarkan Penelitian yang kelompok kami lakukan di Desa Juhar Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang bahwa Bapak Ferdinan Damanik mengatakan banyak keluhan-keluhan yang di dapat dari Masyarakat, keluhan-keluhan tersebut ada dari berbagai aspek baik dari aspek

Kesehatan, Pendidikan, Fasilitas, Pembangunan dan kepedulian perangkat Desa terhadap Masyarakat dan Desanya. Keluhan-keluhan dari Masyarakat ini merupakan ketidakpuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik seperti tingkat kenyamanan, kepastian, kemampuan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik.

Keseluruhan yang kami dapat dari masyarakat desa Juhar Baru yaitu salah satunya dalam bidang pendidikan, masyarakat mengeluhkan jauhnya sekolah disebelah desa sebrang karena jarak yang ditempuh anak-anak yang masih sekolah lumayan sangat jauh , jadi masyarakat berharap agar Adanya kebijakan pemerintah desa terhadap hal tersebut, akses ke pendidikan formal masih terbatas, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil. Kurangnya transportasi atau infrastruktur juga menjadi masalah. Kemudian Beberapa masyarakat merasa bahwa perangkat desa kurang proaktif dalam mendukung program pendidikan, seperti tidak adanya program beasiswa atau pelatihan untuk guru. Kurangnya

komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat mengenai program pendidikan yang ada juga sering dikeluhkan, termasuk dalam hal pengelolaan dana pendidikan.

Berdasarkan Penelitian yang kelompok kami lakukan di Desa Juhar Baru Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Bapak Ferdinan selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa "selama menempati atau memiliki jabatan sebagai sekertaris desa tentunya Perangkat Desa mengharapkan yg terbaik di desa' ini, semakin berkembang menjadi desa' yang semakin maju kedepannya". Sebagai bagian dari perangkat Desa Bapak tersebut mengharapkan pembangunan infrastruktur yang lancar baik dari pusat maupun pemerintah yang lebih tinggi, peningkatan ekonomi lokal baik dari hasil pajak melalui pertanian yang ada didesa ini.

Kemudian Bapak tersebut mengatakan bahwa "sebagai Perangkat Desa tentunya mengharapkan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. dan yang paling

diharapkan itu adalah partisipasi masyarakat aktif dalam pengelolaan desa karna percuma perangkat desa yang baik kalau tidak masyarakat yang aktif karena faktor utama kemajuan desa itu adalah partisipasi masyarakat yang aktif". Perangkat Desa berharap akan membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, agar aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat meningkat. Kemudian Perangkat Desa berharap akan meningkatkan fasilitas pendidikan dan kualitas pengajaran, termasuk pelatihan untuk guru dan program beasiswa bagi siswa berprestasi.

Perangkat Desa berharap akan mendirikan atau memperbaiki fasilitas kesehatan agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Terutama memfokuskan pada bidang kesehatan untuk membangun apotik, Klinik dan Bidan di desa. Dan untuk bidang Pendidikan Perangkat Desa berharap akan adanya bantuan seperti dana dari Pusat untuk mendirikan Sekolah yang dekat dengan Desa tersebut agar menjadi solusi untuk keluhan masyarakat

sebelumnya mengenai akses Pendidikan atau Sekolah yang jauh yang harus ditempuh dengan waktu dan jarak yang lumayan jauh. Membuka posyandu atau klinik desa dan mengadakan penyuluhan kesehatan rutin untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dan pencegahan penyakit.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai strategi pengelolaan Dana Desa dan bentuk kepemimpinan yang diterapkan di Desa Juhar Baru, Kecamatan Galang, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah hasil dari sinergi yang kuat antara strategi teknis yang terbuka dan pola kepemimpinan yang progresif. Strategi pengelolaan Dana Desa di Juhar Baru berpusat pada tiga pilar utama: perencanaan yang inklusif melalui Musrenbangdes yang partisipatif, penerapan transparansi agresif dengan mempublikasikan detail anggaran dan pengeluaran secara kasatmata melalui papan informasi

publik di lokasi strategis, serta penguatan mekanisme kontrol sosial melalui pelibatan aktif BPD dan tokoh masyarakat. Peran Kepala Desa sebagai penentu kebijakan dipadukan secara efektif dengan peran Sekretaris Desa sebagai manajer teknis yang memastikan semua dokumen dan laporan pertanggungjawaban dikelola secara akuntabel dan sesuai regulasi.

Bentuk kepemimpinan Kepala Desa di Juhar Baru cenderung bersifat Partisipatif-Progresif (Transformasional). Pola

kepemimpinan ini ditandai dengan keteladanan (integritas) yang kuat dari Kepala Desa, keterbukaan terhadap kritik dan saran dari masyarakat, serta komitmen untuk mengambil keputusan secara kolektif. Kepemimpinan ini berhasil mengubah posisi masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi mitra aktif dan auditor sosial dalam setiap tahapan penggunaan Dana Desa. Kombinasi strategi teknis yang terbuka dan kepemimpinan yang berintegritas dan inklusif ini menghasilkan modal sosial berupa kepercayaan publik yang tinggi, yang pada akhirnya menjadikan pengelolaan

Dana Desa di Juhar Baru berjalan efektif, minim konflik, dan mencapai tujuan pembangunan desa secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Manajemen, STIE Muhammadiyah
- dan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mewujudkan Dana Desa. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Publik.
- Desa. Jurnal Manajemen Publik.
- Dewi, R., & Gayatri. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas
- Hendra Jaya. (2023). Transparansi Kepala Desa dalam Pemerintahan. Jurnal Administrasi dan
- Herli, M. (2013). Peran Pengawasan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Kebijakan Publik.
- Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal

Masyarakat terhadap Pengelolaan
Dana Desa. Jurnal Keuangan
Publik.

Muhsin, A. (2023). Transparansi dan
Akuntabilitas Pemerintah Desa
dalam Pengelolaan

Palopo.

Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah
Ekonomi dan Bisnis.

Pengembangan Desa Wisata
Berkelanjutan di Indonesia.
Jurnal Governance and
Policy.

Putra, D., & Rasmini, D. (2019).
Pengaruh Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi

Rosyan, A.N. (2022). Hubungan
Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Pengelolaan Dana

Sarinastiti, N.V., & Bhilawa, L. (2023).
Kepemimpinan Kepala Desa
dan Pengawasan

Supriyati, S., Kistyanto, A., & Wardoyo,
D.T.W. (2024). Peran
Kepemimpinan Kepala Desa

Widiono, G.W., & Fathurrahman, R.
(2023). Analisis Gaya
Kepemimpinan Kepala Desa

